

KONDISI INFLASI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh :

Nurlina

Dosen Tetap Universitas Tamansiswa Padang

ABSTRACT

This study aims to determine the number of policies that can be taken by the government to tackle inflation in the economy of Indonesia. The types of data used secondary from the Constant Price Index base on the consumption pattern of the 2007 Cost of Living Survey in 66 cities provinsi Indonesia in 2008 until June 2012 and analyzed by descriptive statistics. The result showed a number of policies address the various types of inflation are inflationary monetary, fiscal monetary and non monetary.

Keywords : inflation, poverty, monetary policy, fiscal policy and non monetary policy.

A . PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga - harga secara umum dan terus menerus. Berkaitan dengan mekanisme pasar inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat, meningkatnya likuiditas pasar yang memicu terjadinya spekulasi dan ketidaklancaran distribusi barang . Dengan kata lain inflasi juga merupakan proses turunnya nilai mata uang secara kontinu dan merupakan proses dari sebuah peristiwa. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan. Istilah inflasi juga dipakai untuk mengartikan peningkatan persediaan uang, kadangkala sebagai penyebab meningkatnya harga. Cara yang paling sering dipakai untuk mengukur tingkat inflasi yaitu *Consumer Product Index (CPI)* dan *Gross National Product (GNP) deflator*.

Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi dimana deflasi berarti penurunan harga barang dan jasa secara umum sehingga menyebabkan kelesuan dalam dunia ekonomi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat inflasi atau deflasi harga barang /dan jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kelompok komoditi yang mengalami inflasi di Indonesia berdasarkan Survey Biaya Hidup di 66 kota tahun 2008 sampai pertengahan tahun 2012 yaitu : 1) bahan makanan, 2) makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, 3) Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, 4) sandang, 5) kesehatan, 6) pendidikan, rekreasi dan olah raga, 7) transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Pada umumnya tingkat inflasi dan indeks umum untuk semua kelompok komoditi di atas mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Inflasi

Inflasi yaitu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara kontinu. Venieris dan Sebold (1978 : 603) mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara kontinu sepanjang waktu. Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum yang terjadi sekali waktu saja tidak dapat disebut sebagai inflasi. Minimal ada 3 hal penting yang ditekankan yaitu 1) adanya kecenderungan harga untuk meningkat, 2) kenaikan tingkat harga berlangsung secara kontinu, 3) tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga umum.

Tingkat inflasi yaitu persentase perubahan dalam tingkat harga sedangkan Indeks harga itu sendiri mengukur biaya dari sekelompok barang tertentu sebagai persentase dari kelompok yang sama pada periode dasar. Secara umum ada 3 indeks harga yaitu 1) Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu suatu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang/jasa di pasar, 2) Indeks Harga Produsen (IHP)

yaitu indeks dari harga bahan-bahan baku, produk antara dan peralatan modal dan mesin yang dibeli oleh perusahaan, 3) Gross National Product (GNP) deflator yaitu indeks yang merupakan rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP riil yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian yang diperoleh saat *output* dinilai dengan memakai harga tahun dasar. GNP nominal yaitu GNP yang dihitung berdasarkan harga pasar berlaku.

2. Penyebab Timbulnya Inflasi

Menurut pandangan kaum Klasik inflasi disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar, pertumbuhan output dan perubahan dalam kecepatan perputaran uang dengan asumsi kecepatan peredaran uang konstan dengan kata lain inflasi merupakan fenomena moneter. Hal yang sama juga dikemukakan kaum Moneteris yang mengklaim inflasi itu sebagai fenomena moneter dan peubah kecepatan perputaran uang adalah stabil. Kaum Moneteris juga berpendapat bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar juga berpengaruh terhadap *output* dan kesempatan kerja, jadi tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat harga.

Menurut pandangan Keynes kecepatan perputaran uang merupakan variabel, bila terjadi kenaikan jumlah uang beredar tidak akan menyebabkan perubahan dalam tingkat harga dengan kata lain tingkat harga akan tetap. Variabel *output* pada jangka pendek juga berkontribusi terhadap pandangan Keynes bahwa inflasi bukanlah murni sebagai fenomena moneter. Keynes mengatakan bahwa pengangguran dapat saja terjadi untuk jangka waktu panjang atau jangka waktu tidak terbatas. Dengan adanya pengangguran maka kenaikan jumlah uang beredar (kecuali dalam kasus ekstrim) akan menyebabkan kenaikan tingkat harga dan tingkat *output*. Dengan kenaikan *output* kenaikan tingkat harga tidak proporsional terhadap kenaikan jumlah uang beredar meskipun kecepatan perputaran uang beredar konstan.

Menurut Keynesian, jumlah uang beredar bukan satu-satunya faktor penentu tingkat harga tapi dalam jangka pendek ditentukan oleh pengeluaran konsumsi

rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan pajak menurut (Edgmand, 1987 ; 280). Menurut Keynesian kontemporer bahwa inflasi merupakan fenomena moneter, akibatnya pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat inflasi.

Menurut pandangan aliran ekspektasi rasional dan ekonomi sisi penawaran memandang inflasi sebagai fenomena moneter dan perubahan yang bersifat antisipatif dalam jumlah uang beredar hanya akan berdampak terhadap tingkat harga dan tidak berdampak terhadap *output* dan kesempatan kerja. Inflasi merupakan fenomena moneter dan jumlah uang beredar sebagai kunci untuk menstabilkan harga. Para ekonom aliran sisi penawaran memandang inflasi sebagai fenomena moneter dan mengusulkan pembatasan moneter untuk mengurangi inflasi, penurunan tarif pajak sebagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan penawaran *agregat*.

Menurut pandangan kaum strukturalis inflasi sebagai sesuatu yang berakar dari adanya berbagai kendala atau kekakuan struktural yang terjadi di negara - negara sedang berkembang. Kaum strukturalis mengidentifikasi ada beberapa kendala penyebab inflasi yakni sbb: 1) kendala penawaran bahan pangan yang bersifat elastis, 2) kendala devisa dan kendala fiskal. Kenaikan jumlah uang beredar adalah faktor permisif yang memungkinkan spiral inflasi membentuk diri dan menjadi komulatif yang mempengaruhi tekanan inflasi dan bukan sebab inflasi itu sendiri menurut (Kirkpatrick and Nixon, 1987).

3. Jenis – Jenis Inflasi

Dilihat dari faktor penyebab timbulnya, inflasi dapat dibedakan atas 3 yaitu sbb : 1) inflasi tarikan permintaan atau inflasi sisi permintaan yakni inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan *agregat* yang terlalu besar dibandingkan dengan penawaran agregat, 2) inflasi dorongan biaya atau inflasi sisi penawaran yakni inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan

biaya produksi yang tinggi dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi sehingga perusahaan mengurangi *supply* barang dan jasa ke pasar, 3) inflasi struktural yakni inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kekakuan struktural sehingga *supply* dalam perekonomian menjadi berkurang terhadap *demand* yang meningkat.

Dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dibagi atas 3 yaitu 1) inflasi sedang yakni inflasi yang ditandai dengan harga yang meningkat secara lambat dan tidak menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif 2) inflasi ganas yakni inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit per tahun dan dapat menimbulkan gangguan serius pada perekonomian, 3) hiperinflasi yakni tingkat inflasi yang sangat parah bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen per tahun dan merupakan jenis inflasi yang mematikan (Samuelson dan Nordhaus, 1992).

4. Dampak Inflasi

Inflasi yang terjadi dalam perekonomian memiliki beberapa dampak sebagai berikut:

- 1) Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan antara anggota masyarakat yang disebut sebagai efek redistribusi dari inflasi sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat.
- 2) Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi karena inflasi dapat mengalihkan sumberdaya dari investasi yang produktif ke investasi yang tidak produktif sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif.
- 3) Inflasi dapat menyebabkan perubahan - perubahan dalam *output* dan kesempatan kerja secara langsung memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.
- 4) Inflasi dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi.

McKinnon (1973) mengemukakan bahwa inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar modal sehingga penawaran dana untuk investasi turun dan sebagai akibatnya investasi sektor swasta tertekan sampai ke bawah tingkat keseimbangan karena terbatasnya penawaran dana yang dapat dipinjamkan. Karenanya, sejauh inflasi menurun ke arah tingkat bunga riil yang rendah dan ketidakseimbangan pasar modal, inflasi akan memperkecil investasi dan pertumbuhan.

5. Pengertian Kemiskinan

Dalam *literature* dikenal istilah kemiskinan mutlak dan kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan mutlak berdasarkan taksiran tingkat pendapatan yang diperlukan untuk pembelian pangan guna memenuhi rata-rata kebutuhan nutrisi seorang dewasa dan anak-anak dalam sebuah keluarga. Bila pendapatan seseorang atau keluarga di bawah angka kemiskinan maka keluarga tersebut berada dalam kondisi miskin dan tingkat pendapatan disebut dengan tingkat pendapatan untuk memenuhi standar kebutuhan minimum yang disebut dengan garis kemiskinan. Kemiskinan relatif adalah derajat ketidakmerataan dalam pendapatan. Jika pendapatan daerah meningkat maka derajat kemiskinan absolut turun dan kemiskinan relatif meningkat berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Konsep dasar kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Kebanyakan negara sedang berkembang tergolong miskin dan tidak ditemukan adanya indikasi *disaving hypothesis* dan tiga siklus yang berhubungan dengan pembentukan tabungan. Pertama, saat seseorang sebelum melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dapat dinilai dari tingkat pendapatan dimana konsumsi lebih tinggi dari pendapatan. Kedua, saat seseorang mulai memasuki usia kerja setiap kenaikan usia kerja akan menyebabkan kenaikan pendapatan secara tidak linier. Ketiga, tambahan pendapatan makin turun dengan makin meningkat usia. Rumah tangga miskin paling rendah jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Ternyata

usia seseorang dimana dugaan penurunan tingkat pendapatan lebih cepat penurunannya dari tingkat konsumsi karena seseorang menarik diri dari angkatan kerja sehingga terjadi *dissaving* (Soekirno, 2004). Jumlah jam kerja seminggu rumah tangga miskin dan tidak miskin berbeda. Tingkat pendapatan rumah tangga berkorelasi positif dengan jam kerja. Pendapatan rata-rata yang bekerja 60 jam seminggu hampir dua kali lipat dari mereka yang bekerja kurang dari 24 jam seminggu.

6. Perangkap Kemiskinan

Teori perangkap kemiskinan memperlihatkan bahwa terdapat lima keadaan seseorang atau sebagian masyarakat yang kurang menguntungkan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga sulit ke luar dari lingkaran kemiskinan. Keadaan yang menguntungkan adalah kemiskinan (*poverty*), kelemahan fisik (*physical weaknesses*), rentan (*vulnerability*), isolasi (*isolation*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*). Keterkaitan kelima kelompok ini akan memberikan 25 hubungan sebab akibat berbentuk negatif seperti sebuah jaring laba-laba untuk menjaring orang-orang dalam kemiskinan. Kemiskinan sebagai penyebab utama kelemahan fisik melalui kekurangan pangan dan gizi, tubuh kecil dan malnutrisi menyebabkan respon kekebalan rendah terhadap infeksi, ketidakmampuan untuk menjangkau atau membayar terhadap jasa-jasa kesehatan yang disediakan pemerintah. Kemiskinan juga merupakan penyebab utama terhadap isolasi karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan atau sekolah dan tinggal di kawasan kumuh serta liar.

7. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan terdapat cukup banyak faktor yang sangat kompleks untuk dikaji karena kondisi satu daerah sangat berbeda dengan daerah lainnya. Berbagai pembahasan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan selalu berkaitan dengan faktor internal dan eksternal (Saputra, 2008) dalam bentuk kelangkaan sumberdaya alam, kelangkaan sumberdaya manusia dan teknologi, kelangkaan faktor produksi

modal ekonomi dan modal sosial serta faktor structural. Berbagai faktor internal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan mobilitas vertikal sehingga menyebabkan rendahnya penguasaan modal sebagai akumulasi pembentukan tabungan. Faktor eksternal dapat saja terjadi karena ketimpangan dalam transaksi jual beli kepada mereka yang memiliki modal.

C. PEMBAHASAN

1. Fluktuasi Kondisi Inflasi Di Indonesia

Tahun 2008 inflasi bahan makanan 16,35%, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 12,53%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 10,92%, sandang 7,33%, kesehatan 7,96%, pendidikan, rekreasi dan olah raga 6,66%, transpor, komunikasi dan jasa keuangan 7,49% serta indeks umum 11,06%. Tahun 2009 inflasi bahan makanan 3,88%, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 7,81%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,83%, sandang 6%, kesehatan 3,89%, pendidikan, rekreasi dan olah raga 3,89%, transpor, komunikasi dan jasa keuangan -3,67% serta indeks umum 2,78%. Tahun 2010 inflasi bahan makanan 15,64%, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 6,96%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 4,08%, sandang 6,51%, kesehatan 2,19%, pendidikan, rekreasi dan olah raga 3,29% transpor, komunikasi dan jasa keuangan 2,69% serta indeks umum 6,96%. Tahun 2011 inflasi bahan makanan 3,64%, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 4,51%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 3,47%, sandang 7,57%, kesehatan 4,26%, pendidikan, rekreasi dan olah raga 5,16%, transpor, komunikasi dan jasa keuangan 1,92% serta indeks umum 3,79%. Bulan Januari 2012 sampai Juni 2012 inflasi bahan makanan 2,33%, makanan jadi, minuman, rokok dan kesehatan 2,99%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,81%, sandang 1%, kesehatan 1,44%, pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,49%, transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,71% serta indeks umum 1,79%.

Dari 66 kota propinsi di Indonesia Indeks Harga Konstan, 21 kota mengalami inflasi sedangkan 45 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Pangkal Pinang sebesar 0,74% dan terendah di Dumai sebesar 0,01%. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di kota Singkawang sebesar 2,18% dan terendah di kota Medan sebesar 0,02%.

Berdasarkan angka diatas ternyata inflasi tertinggi untuk 8 kelompok komoditi relatif tinggi terjadi tahun 2008 dan 2010. Hal ini mungkin terjadi karena adanya kendala struktural dalam sektor pertanian yang didominasi oleh kelompok non kapitalis yang berkeinginan untuk memaksimumkan laba. Kendala devisa juga sebagai salah satu penyebabnya, timbul karena nilai pertumbuhan penerimaan devisa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan barang impor yang meningkat berkenaan dengan usaha pembangunan yang semakin cepat, pertumbuhan penduduk dan upaya industrialisasi yang pesat berlansung dalam lingkungan dengan teknologi masih terbatas serta moblitas faktor yang tidak sempurna. Kekurangan barang impor dan meningkatnya harga barang impor sekaligus kenaikan harga kumulatif ; kesulitan neraca pembayaran sehingga terjadi devaluasi mata uang, selanjutnya menambah beratnya tekanan inflasi dalam negeri terutama bila elastisitas harga permintaan barang impor sangat rendah.

Tidak cukupnya sumberdaya keuangan dalam negeri juga penyebab terjadinya inflasi. Usaha pembangunan memperbesar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, tapi penerimaan pemerintah jarang meningkat pesat untuk mengimbangi kenaikan pengeluaran. Struktur pajak bersifat regresif dan birokrasi penagihan pajak kurang efisien, biasanya diatasi dengan cara anggaran defisit yang erat kaitannya dengan pembengkakan kredit dalam negeri karena pengeluaran pemerintah tidak mudah dikurangi dan penerimaan tidak mudah ditingkatkan sehingga merupakan salah satu komponen pokok mekanisme perambatan inflasi.

2. Kebijakan Untuk Mengatasi Inflasi

Inflasi harus diatasi oleh pemerintah melalui otoritas moneter dengan melakukan kebijakan dibidang moneter, fiskal dan non moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan mengurangi jumlah uang beredar menuju kondisi normal. Dalam hal ini Bank Indonesia menjalankan beberapa kebijakan dalam bentuk kebijakan diskonto, pasar terbuka dan menaikkan *cash ratio*. Kebijakan diskonto ditujukan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit yang tinggi maka aktivitas ekonomi yang memakai dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal. Kebijakan pasar terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal sehingga diharapkan masyarakat membeli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang memiliki tingkat bunga tinggi sehingga jumlah uang beredar dimasyarakat berkurang. *Cash ratio* berarti cadangan yang diwajibkan Bank Sentral kepada bank – bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari Bank Sentral atau pemerintah. Dengan menaikkan perbandingan jumlah uang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang beredar berkurang.

Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah, antara lain dalam bentuk pengurangan pengeluaran pemerintah sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan, menaikkan pajak sehingga penerimaan uang masyarakat berkurang, daya beli masyarakat menurun tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif berkurang.

Kebijakan non moneter dapat dilakukan dengan menaikkan hasil produksi, dan cara ini cukup efektif karena inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang beredar. Oleh karena itu

pemerintah membuat prioritas produksi atau memberikan subsidi kepada produksi beras dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Bentuk lain kebijakan non moneter yakni kebijakan upah, sebagai upaya untuk menstabilkan upah/gaji dalam arti bahwa upah tidak sering dinaikkan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan meningkatkan daya beli akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang - barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

3. Kondisi Kemiskinan Di Indonesia

Menurut (BPS, 2016) jumlah penduduk miskin penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang (10,86%) berkurang 0,5 juta orang dibandingkan 1 September 2015 sebanyak 28,51 juta orang (11,13%). Penurunan angka kemiskinan justru terasa aneh. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22% turun menjadi 7,79% pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan naik dari 14,09% pada September 2015 menjadi 14,11% pada Maret 2016.

Ketika data nasional menunjukkan tendensi kemiskinan jumlah kemiskinan turun di perkotaan sementara di pedesaan justru naik. Secara implisit dampak pembangunan lebih dapat mengurangi kemiskinan perkotaan namun belum terarah dan ampuh untuk masyarakat yang hidup di pedesaan. Stagnasinya pembiayaan melalui APBN 2015 dipercaya sebagai salah satu yang menjelaskan kenapa efek akselerasi program pemerintah berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di pedesaan. Jika kenaikan angka kemiskinan di pedesaan juga diikuti oleh peningkatan kemiskinan di perkotaan, bisa jadi selain sangat tergantungnya propinsi terhadap pendanaan dari APBN, program-program investasi swasta dan pemerintah juga tidak berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

4. Kebijakan Pro Miskin

Kondisi kemiskinan nasional mesti melakukan kebijakan yang pro kepada rakyat miskin. Tiga paket kebijakan mendasar perlu disiapkan dan semangatnya makin meningkat untuk semua pengambil kepentingan. Pertama, saat kebijakan yang khas dimasing-masing daerah menyentuh sasaran program kemiskinan. Desain program secara khusus perlu dilakukan yang ditujukan kepada kelompok rumah tangga yang paling besar mengalami kemiskinan seperti rumah tangga berlahan sempit, rumah tangga nelayan dan buruh perkotaan. Program khas ini dapat diinisiasi oleh pemerintah daerah dan diperbaharui semangatnya. Namun tetap menjaga agar jangnan program yang disusun membuat kelompok rumah tangga miskin menjadi korban dari kebijakan. Kedua, memastikan program-program publik di perkotaan dan pedesaan berjalan dengan mengoptimalkan sumberdaya pedesaan baik tenaga kerja maupun bahan-bahan yang dapat dihasilkan untuk mewujudkan program-program publik. Program yang ditujukan pada aktivitas perluasan lapangan kerja dan permintaan turunan terhadap program-program publik niscaya akan menyebabkan semakin banyaknya aktivitas turunan dari program publik. Ketiga, program peningkatan produksi dan nilai tambah sangat diperlukan. Selama ini kontribusi inovasi dalam meningkatkan nilai tambah barang dan jasa masih berkisar 16% padahal Taiwan dan Korea Selatan peranan inovasi sudah melebihi 50%. Menurut temuan Piere Van Der Eng dari Australia National University untuk konteks Indonesia kita kekurangan daging tapi belum terlihat program peternakan yang membunai dan berinovasi. Kita kekurangan protein kedele namun belum ada program kedelenisasi dilakukan. Begitu juga untuk yang lainnya. Kenyataannya yang terjadi bagi petani pedesaan ketiadaan hadirnya pemerintah mereka rasakan dan diklaim mereka tidak memperoleh apa-apa dari program pemerintah. Ini bisa jadi karena belum adanya inisiasi secara komprehensif bagaimana desain program kemiskinan dilakukan dalam skala mikro dan terus menerus. Ketika hal ini dilakukan dan

menunjukkan tanda berhasil maka akan relatif mudah mereplikasikannya. Tidak perlu banyak program kemiskinan namun perlu terarah dan berkesinambungan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Inflasi merupakan gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara kontinu yang terjadi dalam perekonomian sebuah negara. Berbagai jenis inflasi yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai kebijakan moneter, fiskal dan non moneter. Jika inflasi tidak segera diatasi maka dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga dan penanaman modal secara spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

2. Saran

Pemerintah diharapkan harus segera mengambil kebijakan dan harus melindungi masyarakat dari inflasi, karena inflasi dapat menurunkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga harus mendukung program pemerintah untuk mengatasi inflasi dan kemiskinan dengan melakukan penghematan pemakaian BBM dan efisiensi disektor transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, Andrew B. And Ben S. Bernanke. 1998. *Macroeconomics, Third Edition*. Reading : Addison Wesley Longman, Inc.
- Barro, Robert J. 1989. *The Ricardian Approach to Budget Deficits in Journal of Economic Perspectives Vol.3 Number 2 Spring, pp 37 – 54.*
- Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer. 1990. *Macroeconomics Fourth Edition*. Tokyo : McGraw-Hill Book Company.

Mankiw, N.Gregory. 2000. Macroeconomics Fourth Edition. New York : Worth Publishers.

Nanga, Muana.2001. Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Perdana Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.